

## ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BENGKULU

Decky Rifa'i Akbar<sup>(1)</sup> Rosidin<sup>(2)</sup>

<sup>(1)(2)</sup> Prodi Administrasi Publik UM Bengkulu

[rifaiakbardecky@gmail.com](mailto:rifaiakbardecky@gmail.com)

### ABSTRAK

The role of the Regional Planning, Research and Development Agency of Bengkulu Province is a Regional Apparatus Organization (OPD) that plays a role as a supporting element for the government in the field of regional development planning. The purpose of this study is to find out the Role of the Regional Planning, Research and Development Agency of Bengkulu Province in Development Planning in Bengkulu whether it has run optimally in the development planning process in Bengkulu. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The theory used in this study is the role theory from Soerjono Soekanto with indicators of active role, participatory role and passive role. The results of the study show that the implementation of the role of BAPPEDA of Bengkulu Province in development planning in Bengkulu has not fully gone well. Based on the results of observations, the researcher still found several problems in the passive role of the Bengkulu Provincial BAPPEDA that were experienced, such as differences in Central Policies (between Ministries/Institutions) related to the preparation of planning and development documents at the regional level. Second, the synergy of development planning, both at the regional and national levels, has not been optimal. The third is the difference in interests between Regencies/Cities in Bengkulu Province.

**Keywords:** Role analysis, role of BAPPEDA

### PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara. Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa di dasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional (Abbas and Badan, 2020).

Pembangunan makro menurut (Rizam, 2019), mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Dalam pendapat tersebut terkandung suatu pengertian bahwa pembangunan sektoral yang memfokuskan pada bidang- bidang tertentu yang menekankan pada pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tertentu.

Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana di kemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi, “kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” (Rizam, 2019).

Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa

dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan *political will* yang tinggi untuk memberikan kewenangannya kepada daerah (Mahadiansar *et al.*, 2020).

Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945, Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa (Soliha, 2022). Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana (Pane, 2021).

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya (Rizam, 2019).

Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangannya di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materi dan spiritual. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif (Soliha, 2022).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Rizam, 2019).

Maka untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, maka yang sangat penting diperhatikan pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, baik di pusat maupun di daerah khususnya di daerah pedesaan (Rizam, 2019).

Sebab kita lihat sesuai dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air. Memang sudah hal yang wajar apabila pemerintah saat ini lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan di Provinsi dan daerah di kabupaten untuk memacu pembangunan daerah yang masih tertinggal (Pokok *et al.*, 2023).

Alasan Pemerintah juga menyadari hal ini, terbukti dengan program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitikberatkan pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi sampai dengan pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 lalu disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana melalui Undang-Undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Provinsi akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV Tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan

pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu (Soliha, 2022).

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bagian keempat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nurhidayah, 2021).

Hal ini jelas di atur dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah atau perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit (Nurhidayah, 2021).

Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat agar peranan Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Maramis, Nayoan and Waworundeng, 2021).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah (Pane, 2021).

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan di dalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan BAPPEDA di Provinsi Bengkulu sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. (Politik and Riyati, 2022).

BAPPEDA Provinsi Bengkulu berfungsi membantu Gubernur dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat (Politik and Riyati, 2022).

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan BAPPEDA tersebut sebagai badan yang turut aktif

membantu Gubernur dalam Perencanaan Pembangunan daerah (Politik and Riyati, 2022).

Tentu perencanaan pembangunan daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi BAPPEDA mestilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Abbas and Badan, 2020).

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, salah satu proses yang mewadahi hal tersebut adalah dengan diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga tingkat Desa/Kelurahan (Politik and Riyati, 2022).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah unsur pendukung pemerintah Provinsi Bengkulu dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Bengkulu mestilah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Gubernur, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah Provinsi Bengkulu dirasakan belum maksimal dan merata (Asri, Imanda and Lorita, 2023).

Untuk itu perlu kita ketahui apa arti daripada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik (Asri, Imanda and Lorita, 2023).

Berdasarkan Rencana Strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu 2021-2026 menjelaskan bahwa kinerja dalam urusan perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu sudah baik, dibuktikan dengan prestasi perencanaan daerah Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik II Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan mendapat gelar berturut-turut dari tahun 2020, 2021, 2022.

Rencana Strategis ( Renstra ) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan Penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2). Di dalamnya menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang ditandai dengan yang pertama meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga dalam dan luar negeri dan sektor swasta. Yang kedua meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif. Selanjutnya yang ketiga meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Yang keempat meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait. Dan yang terakhir meningkatnya penyediaan data informasi pembangunan Provinsi Bengkulu kepada masyarakat dan instansi.

Tentunya dari prestasi yang sudah di lakukan dan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi

Bengkulu dalam perencanaan pembangunan di Bengkulu, pastinya ada juga fenomena masalah pokok yang harus dihadapi yaitu yang pertama, adanya perbedaan Kebijakan Pusat (antar Kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan kelitbangan ditingkat daerah. Yang kedua perbedaan kepentingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah dan sangat menarik diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan di Bengkulu**”.

## **METODE**

### **Tempat Penelitian**

Untuk tempat pelaksanaan penelitian adalah di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Bengkulu. Lokasi Kantor ini berada di Jalan Pembangunan Nomor 15 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih oleh peneliti untuk mengetahui Bagaimana Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh Makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan Pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, Menganalisis data (Creswell 2010:5).

Alasan lain penelitian ini menggunakan Metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam proses perencanaan pembangunan. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong terhadap proses perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan obeservasi langsung saat melakukan penelitian.

### **Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki masalah yang melibatkan berbagai aspek yang signifikan untuk diperiksa secara komprehensif sehingga dalam hal membutuhkan suatu batasan masalah penelitian. Sehingga penetapan fokus penelitian menjadi penting guna membantu menghindari bias data, memastikan penelitian berfokus pada hal-hal yang penting secara mendasar dan membantu peneliti dalam menyusun pembahasan dan membuat kesimpulan.

Menurut Moleong (2014), fokus penelitian yakni esensi didapatkan baik melalui wawasan atau pengetahuan peneliti yang didapat melalui kajian bahan bacaan. Terkait perumusan isu dan tujuan penelitian, fokus penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Fokus Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Penjelasan	
1.	Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Peran Aktif	1. Peran pada setiap bidang BAPPEDA Provinsi Bengkulu
		Peran Partipatif	1. Aspirasi Masyarakat
		Peran Pasif	1. BAPPEDA Provinsi Bengkulu mengikuti atau menunggu arahan dari Gubernur untuk menjalankan perencanaan pembangunan di Bengkulu 2. Perbedaan kebijakan pusat terkait penyusunan dokumen perencanaan

*Sumber : Peneliti 2024*

### **Sumber Data**

Sumber data penelitian di BAPPEDA Provinsi Bengkulu sangat bervariasi tergantung pada tujuan dan lingkup penelitian. Adapun beberapa sumber data umum yang sering digunakan meliputi :

1. Data Primer

Data informasi yang didapatkan bersumber langsung dari informan yang di tentukan

2. Data Sekunder

Informasi yang telah dikumpulkan sebagai pelengkap data sebelumnya yaitu oleh instansi pemerintah, lembaga statistik, atau lembaga lainnya.

### **Penentuan Informan Penelitian**

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32) dalam (Sholihah and Chrysoekamto, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah :

**Tabel 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1
2	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1
3	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1
4	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	1
5	Kabid Penelitian dan Pengembangan	1
6	Kasubbid Data dan Informasi	1
7	Masyarakat	2
	Jumlah	8

*Sumber : Peneliti*

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti BAPPEDA Provinsi Bengkulu, Pegawai BAPPEDA Provinsi Bengkulu dan SKPD Provinsi Bengkulu yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan dalam pembangunan daerah.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171) dalam (Yulawati, Sopanah and ..., 2022).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Bappeda Provinsi Bengkulu yang tercakup dalam wilayah studi.

### **Keabsahan Data**

Pengabsahan data merupakan suatu proses untuk memastikan seluruh yang telah diperhatikan dan diselidiki sesuai dengan informasi yang tersedia. yang sebenarnya. Tujuannya guna menjaga dan menjamin kebenaran dari data yang didapatkan, bagi pembaca dan subjek penelitian. Untuk Mendapatkan tingkat validitas data dengan memakai triangulasi, dengan melakukan perbandingan antara berbagai sumber data yang berbeda atau informasi yang saling berkaitan. Dalam upaya mendapatkan data yang terpecaja peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Waktu
3. Triangulasi Teknik

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelahnya dalam rentang waktu tertentu. Tahap analisis data merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Analisis data pada Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu dilakukan sebelum terjun langsung ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan, dan setelah penelitian selesai di lapangan.

Data penelitian ini tentu saja di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa aktivitas yang terjadi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, berlangsung terus menerus hingga proses selesai, dan dilanjutkan sampai data mencapai tingkat kejenuhan.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan seringkali besar, sehingga pencatatan yang teliti dan rinci menjadi penting. Seiring waktu, ketika peneliti terus berada di lapangan, jumlah dan kompleksitas data cenderung meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah analisis data yang mencakup proses reduksi data.

Proses reduksi data melibatkan rangkuman informasi, pemilihan unsur-unsur kunci, penekanan pada aspek yang signifikan, identifikasi tema dan pola, serta penghilangan unsur-unsur yang tidak relevan. Melalui reduksi data, hasilnya menghasilkan gambaran yang lebih terfokus, memudahkan peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data berikutnya dan memberikan ketergalian lebih lanjut jika dibutuhkan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah penyusunan informasi terstruktur yang memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini merupakan unsur kunci dalam analisis kualitatif yang valid, melibatkan penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram untuk menggabungkan informasi secara menyeluruh dan mudah dipahami. Dalam konteks penyajian data kualitatif, format teks naratif adalah yang paling umum digunakan. Melalui tampilan data ini, pemahaman terhadap situasi menjadi lebih mudah, dan perencanaan tindakan selanjutnya dapat dilakukan secara lebih efektif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan melibatkan penjelasan yang cermat terhadap hasil dari tahap reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tetap didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan. Makna yang terungkap dari data lain harus diperiksa dengan teliti terkait kebenaran, kekokohan, dan konsistensinya. Kesimpulan akhir tidak hanya terbentuk selama proses pengumpulan data, tetapi juga perlu diverifikasi untuk memastikan keabsahannya sepenuhnya.

## HASIL

### Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan jumlah informan yang memiliki kemampuan untuk secara jelas menggambarkan analisis peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan di Bengkulu. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan metode sampel purposif (*purpove sampling*) yang berarti informan dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan gambaran yang relevan terkait topik penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara pada bulan Juni 2024 di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Karena penelitian kualitatif, fokusnya lebih kepada proses daripada hasil. Namun hasilnya tetap penting dan tidak diabaikan. Wawancara dilakukan terhadap 8 orang informan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Karakteristik Informan**

Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
Dr. Hendy Afrizal, SE, MM	Laki-laki	S3	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Sepragusri, ST, M.Si	Laki-laki	S2	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Dr. Ir. Hisbah Varina, S.E, M.Kes	Perempuan	S3	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Agus Saptaji, ST, MM	Laki-laki	S2	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
Almidianto, SE, MT	Laki-Laki	S2	Kabid Penelitian dan Pengembangan
Anggadi Granang, S.IP, M.AP	Laki-laki	S2	Kasubbid Data dan Informasi
Yeni Mardianti	Perempuan	SLTA	Masyarakat
Reki	Laki-laki	S1	Masyarakat

*Sumber : Peneliti 2024*

### Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada konteks ini, peneliti membahas dan menjelaskan tentang analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap indikator-indikator penelitian yang berkaitan dengan Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto, dimana ia menyatakan dalam karyanya bahwa peran dapat diartikan sebagai suatu

organisasi setiap manusia mempunyai macam-macam karakteristik dalam menjalankan setiap kewajiban, tugas serta memenuhi tanggungjawab yang sudah diberikan oleh setiap lembaga instansi atau organisasi.

Pada Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Bengkulu dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur*".

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Dalam peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk menjalankan wewenangnya mengemban tugas Perencanaan Pembangunan Daerah tentunya terdapat peran yang harus dijalankan yaitu :

#### **Peran Aktif**

BAPPEDA Provinsi Bengkulu sangat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah di Bengkulu. Dalam menjalankan visi dan misi BAPPEDA provinsi Bengkulu tentunya didukung oleh kinerja setiap bidang yang ada di kantor BAPPEDA. Berdasarkan hasil wawancara, Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bapak Dr. Hendy Afryzal, SE, MM mengatakan bahwa :

"ya peran bidang ini untuk mendukung kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan melaksanakan tugas pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan sudah sangat optimal. Karena terdapat faktor yang mendukungnya yaitu penggunaan sistem informasi sudah berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan. Contohnya sudah terdapat website seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di dalamnya memuat sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)".

Sejalan dengan pernyataan dari Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Menurut bapak Anggadi Granang, S.IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi menyatakan bahwa :

“ya sesuai yang di jabarkan oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bidang ini sudah di jalankan sesuai perannya dalam membantu BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Semua data informasi terkait perencanaan pembangunan sudah kami bukukan ke dalam buku SIPD yang di dalamnya terdapat perencanaan pembangunan yang sudah bisa di akses untuk publik ( Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Selanjutnya peneliti mendapat hasil wawancara dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Menurut Bapak Sepragusri, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memberikan penjelasan yakni :

“bidang ini sangat berperan dalam hal fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kami melayani berbagai sistem perizinan untuk semua kalangan masyarakat. Kami menerima dengan baik semua masukan dari berbagai kalangan. Karena setiap masukan buat bidang ini, kami menerima arahan baik gunanya untuk mengedepankan kualitas pembangunan di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu ini agar sesuai dengan visi dan misi kami. Dan adapun hal yang membuat kami bisa berjalan dengan baik selama ini adalah sistem keterbukaan informasi dan perencanaan kami sudah terarah dengan baik ( Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalan dengan pendapat Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menurut bapak Anggadi Granang, S.IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi memberikan pernyataan yaitu :

“Seperti yang dikatakan Bapak Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, memang bidang ini sudah berjalan dengan optimal karena kami didukung dengan sistem keterbukaan informasi dan keterbukaan pelayanan yang bisa di akses semua kalangan masyarakat instansi dan lembaga lainnya (Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Penelitian selanjutnya dari hasil wawancara pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Menurut Ibu Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyatakan bahwa :

“peran bidang ini dalam membantu BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk menangi hal perencanaan pembangunan daerah yaitu membantu dalam peran penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan daerah. Aspeknya pada pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Pelayanan kami sudah kami matangkan dan dalam data informasi kami memberikan keterbukaan informasi kepada pihak instansi atau kalangan masyarakat. Mengapa demikian? Karena kalangan masyarakat sangat mempengaruhi sistem kerja kami. Karena dari aspirasi masyarakatlah, kami bisa menganalisis dan bekerja kompeten untuk membantu BAPPEDA ini dalam hal urusan perencanaan pembangunan (Hasil wawancara pada tanggal 04 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalan dengan fakta yang disampaikan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menurut bapak Anggadi Granang, S.IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi menjelaskan juga bahwa:

“bidang ini adalah salah satu bidang yang ada di BAPPEDA Provinsi Bengkulu yang bertanggungjawab memfasilitasi pembangunan pemerintahan daerah. Bidang ini

sudah berjalan sesuai tugasnya. Contohnya dalam perekapan fasilitas yang ada di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Semuanya sudah di data dan dirangkum ke dalam RENJA yang bisa diakses oleh publik. RENJA adalah rencana kerja yang memuat data pembangunan pemerintahan kedepannya. Data tersebut sangat membantu BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi dari Provinsi Bengkulu (Hasil wawancara pada tanggal 04 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Selanjutnya hasil penelitian pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus Saptaji, ST, MM selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan mengatakan bahwa :

“dalam hal membantu peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk perencanaan pembangunan, bidang ini membantu dalam aspek perencanaan pembangunan Infrastruktur, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup, serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Baik dalam kinerja kami sudah bisa menjalankan tanggungjawab sepenuhnya dan sudah bekerja sesuai arahan dan optimal. Karena sudah dibuktikan dalam Pohon Kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Setiap bahan kebijakan teknis sudah kami buat dengan data yang terinci dan terbuka baik untuk pihak manapun (Hasil wawancara pada tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalan yang dinyatakan oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, menurut Bapak Anggadi Granang, S,IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi menyatakan pendapat bahwa :

“benar yang dikatakan oleh ibu Kabid kami, pada bidang ini berkenaan dengan tugasnya dalam membantu BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan dari visi dan misi BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Data yang sudah dibuat oleh bidang ini sudah tercantum dalam Pohon Kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu didalamnya kami merekab semua yang di buat dan disusun oleh bidang ini dalam hal infrastruktur wilayah (Hasil wawancara pada tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Penelitian selanjutnya pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menurut Bapak Almidianto, SE, MT selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mengungkapkan bahwa :

“ ya untuk dalam hal menjalankan visi dan misi, BAPPEDA Provinsi Bengkulu membuat bidang ini untuk menjalankan tanggungjawab perihal aspek urusan penyelenggaraan baik itu urusan pemerintahan pada setiap OPD di Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk data kami sajikan kedalam RENSTRA, yang dimana RENSTRA ini memuat rencana strategis BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam tahun selanjutnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Data ini kami sajikan agar bermanfaat dan bisa jadi acuan bagi pihak instansi lain untuk mendukung peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuannya. Adapun hasil ini nantinya bisa berguna pada hasil kinerja kami yang dimana sudah berjalan dengan baik (Hasil wawancara pada tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalannya dengan pendapat yang disampaikan oleh Kabid Penelitian dan Pengembangan, Bapak Anggadi Granang, S,IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi menyatakan pendapat bahwa :

“untuk bidang litbang ini adalah bidang yang bertanggung jawab pada penelitian terhadap OPD lainnya dan mengenai bidang ini dalam membantu peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam hal perencanaan pembangunan sudah berjalan optimal. Dikarenakan setiap masalah terkait penelitian dan pengembangan datanya sudah direkapkan kepada saya sehingga saya membuat rangkuman yang menjelaskan rencana perencanaan pembangunan kedepannya di buat dalam RENSTRA (Hasil wawancara pada tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

### **Peran Partisipatif**

Pada tahap peran partisipatif, peran ini digunakan sebagai ketentuan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat tentunya. Masyarakat disini tentunya akan lebih percaya kepada proyek pembangunan apabila dalam setiap program perencanaan pembangunan daerah mereka dilibatkan dalam prosesnya.

Tujuan dari peran ini adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dalam hal perencanaan pembangunan dan masyarakat lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk itu peran Partisipatif sangat di butuhkan dan harus dijalankan secara baik dan optimal oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hendy Afrizal, S.E, MM mengatakan :

“peran partisipatif yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu sekarang sudah terbilang sangat baik. Kemarin acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis serta untuk penyempurnaan atas rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2025 dengan menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Jadi untuk hal perencanaan bottom up ini, kami sangat membutuhkan aspirasi masyarakat tersebut dan kami sudah menjalankan dengan baik dan secara optimal apa yang dibutuhkan masyarakat terkait pembangunan daerahnya (Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalan dengan pendapat Bapak Dr. Hendy Afrizal, S.E, MM. Penelitian ini juga mengambil data dari masyarakat Provinsi Bengkulu yaitu Ibu Yeni Mardianti yang sudah ikut menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan, ia mengatakan bahwa :

“iya saya sebagai masyarakat sudah ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di Bengkulu ini. Karena kemaren saya sudah menyempatkan hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025. Sebetulnya kaum ibu-ibu sudah bisa menyampaikan aspirasinya untuk membantu pelaksanaan perencanaan pembangunan. Disana saya menyatakan aspirasi dan mengusulkan niat saya dari hati saya sendiri. Adapun aspirasi saya sangat diterima dengan baik oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Pihak OPD tersebut sangatlah mengedepankan suara masyarakat yang sudah menjadikan kami kalangan masyarakat sangat mempengaruhi proses berjalannya perencanaan pembangunan di daerah ini (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB di kediaman Ibu Yeni Mardianti )”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Reki selaku seorang Mahasiswa sebuah Universitas di Bengkulu yang telah ikut berpartisipasi dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 mengatakan bahwa :

“dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 kemarin, saya salah satu sebagai perwakilan dari sebuah Universitas dari Bengkulu turut berperan serta dalam acara tersebut. Di sana saya sangat antusias dikarenakan keterbukaan ruang aspirasi dan saling menyampaikan aspirasi untuk kemajuan perencanaan pembangunan di Bengkulu. Dan juga di dalamnya banyak sekali kalangan masyarakat yang ikut

berpartisipasi untuk menyampaikan hak suaranya demi membangun kemajuan pembangunan. Pihak OPD BAPPEDA Provinsi Bengkulu sangat menerima apa yang kami sampaikan sehingga dapat membantu jalannya proses perencanaan pembangunan untuk tahun selanjutnya. Perencanaan bisa terkoordinasi dengan baik atas pengaruh dari aspirasi berbagai kalangan masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB di kediaman Reki)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Dr. Hendy Afryzal, SE, MM selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Ibu Yeni Mardianti selaku masyarakat Provinsi Bengkulu dan Saudara Reki sebagai Mahasiswa dari sebuah Universitas yang ada di Bengkulu yang telah ikut berpartisipasi dalam menyampaikan suaranya yang sangat berpengaruh untuk proses perencanaan pembangunan di Bengkulu. Masyarakat sudah sangat merasakan manfaat yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk membuka forum. Dan masyarakat juga tidak susah payah lagi untuk menyampaikan aspirasinya dikarenakan BAPPEDA sudah membuat website yang sudah bisa diakses untuk semua kalangan masyarakat. Sehingga pada peran partisipatif yang dijalankan oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

### **Peran Pasif**

Indikator Peran Pasif dalam teori peran dapat diartikan sebagai dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan atau menunggu arahan sehingga berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa teori peran pasif yang dimaksudkan untuk BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah menyoroti situasi yang dimana BAPPEDA lebih bersifat sebagai lembaga yang menunggu arahan atau instruksi dari pihak seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, BAPPEDA cenderung melakukan peran yang lebih reaktif daripada proaktif dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Peran Pasif BAPPEDA juga tertitik pada perbedaan kebijakan pusat terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan. Sehingga peran yang dilakukan oleh BAPPEDA belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Hendy Afrizal, SE, MM selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian mengatakan bahwa :

“untuk peran pasifnya BAPPEDA sendiri tidak ada wewenang dalam hal menggerakkan tetapi harus menunggu arahan dan koordinasi dengan Gubernur atau Pihak OPD lainnya yang harus saling sinkron dan saling bekerjasama untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk contohnya bisa dilihat pada RENSTRA BAPPEDA Provinsi Bengkulu dikarenakan adanya susunan perangkat daerah baru sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2016 yang dimana BAPPEDA Provinsi Bengkulu harus menyelaraskan strategi untuk mendukung 5 program prioritas Gubernur tahun 2021-2026. Sehingga pada peran ini BAPPEDA Provinsi Bengkulu belum berjalan optimal (Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas , hasil dari penelitian ini menemukan fakta yang terjadi pada Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu belum optimal pada indikator peran pasif nya. Sehingga untuk menjalankan tugasnya, BAPPEDA harus mengoptimalkan permasalahan tersebut guna mengurangi permasalahan yang terjadi selanjutnya.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan**

Menurut teori analisis medan gaya yang dikemukakan oleh Lewin, sebelum mencapai suatu hasil, terdapat dua jenis gaya yang berperan. Gaya pertama adalah faktor pendorong yang mendukung perubahan, sedangkan gaya kedua adalah hambatan yang menghalangi

perubahan. Keseimbangan antara kedua gaya ini menentukan tercapainya kondisi yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan di Bengkulu dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

### **Faktor Pendorong**

Meskipun peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi pencapaian tujuannya, terdapat pula faktor-faktor yang mendorong dan mempermudah pelaksanaan kebijakan Sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah ini dibuat dan disusun untuk mempermudah kerja setiap OPD dalam menyusun dokumen perencanaan. BAPPEDA Provinsi Bengkulu juga telah terbantu secara maksimal dan bisa terarahkan sesuai tujuannya.
2. Adanya SDM Aparatur perencana yang sudah berpendidikan tinggi. Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu terbanyak adalah golongan III.
3. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan. Teknologi informasi sudah terdapat di website <https://bappeda.bengkuluprov.go.id> yang merupakan ruang keterbukaan bagi kalangan masyarakat yang ingin tau kondisi perencanaan pembangunan di Bengkulu.
4. Adanya kepedulian dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Bengkulu. Masyarakat sudah sangat berpengaruh dan mempengaruhi kualitas kinerja perencanaan pembangunan di Bengkulu. BAPPEDA Provinsi Bengkulu juga sudah memberikan ruang keterbukaan dengan membuat teknologi informasi yang bisa diakses oleh kalangan masyarakat.
5. Kinerja yang optimal setiap bidang di Kantor BAPPEDA. Adapun setiap bidang di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah mengoptimalkan kualitas dan kinerja dalam mengemban tugasnya untuk membantu kinerja dari Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
6. Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu sarana dan prasarana sudah sangat memadai untuk membantu proses perencanaan pembangunan.

Menurut Bapak Hendy Afrizal, MM selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, beliau mengatakan bahwa :

“Kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu pastinya untuk bisa berjalan optimal ada hal-hal yang mendukungnya. Ada enam faktor pendukung atau pendorong kinerja peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam proses perencanaan pembangunan yang sudah di paparkan diatas. Pendukung tersebut kami buat sebagai acuan dan tolak ukur bagi kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu agar berjalan dengan lancar (Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Sejalan dengan pendapat dari Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, menurut Bapak Anggadi Granang, S.IP, M.AP selaku Kasubbid Data dan Informasi menyatakan pendapat bahwa :

“benar yang dikatakan bapak Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah untuk faktor pendukung ada 6 faktor yang menjadikan pendukung peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Keenam faktor ini sudah dioptimalkan dengan baik guna mempengaruhi kinerja mencapai tujuan visi dan misi (Hasil

wawancara pada tanggal 03 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Berdasarkan hasil penelitian untuk faktor pendorong peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan daerah di Bengkulu sudah menjadikan faktor yang di optimalkan sudah berjalan dengan baik.

### **Faktor Penghambat**

Setelah terdapat faktor pendorong peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu. Pasti ada juga faktor penghambat terhadap jalannya Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementrian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan kelitbangan ditingkat daerah.
2. Adanya kendala dengan menunggu arahan Gubernur yang harus disesuaikan dan dijalankan sesuai dengan petunjuknya.

Berdasarkan penelitian menurut Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan daerah, Bapak Dr. Hendy Afrizal, SE, MM mengatakan bahwa:

“ya dalam menghadapi tantangan ini kami mengalami ketidaksielarasan antara kebijakan pusat dan daerah serta harus menunggu arahan dari Gubernur sehingga menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program-program yang sudah direncanakan. Bukan hanya itu dampaknya juga bisa mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan ketidakefisienan ” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu)”.

Dapat disimpulkan faktor penghambat pada peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu meliputi yang pertama, adanya perbedaan Kebijakan Pusat (antar Kementrian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan kelitbangan ditingkat daerah. Yang kedua, harus menunggu arahan atau petunjuk dari Gubernur. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan daerah di Bengkulu masih terhambat.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu mencakup peran aktif yang di lakukan oleh setiap bidang. Peran aktif setiap bidang di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi membantu kinerja BAPPEDA Provinsi Bengkulu agar berjalan sesuai visi dan misinya. Ada peran partisipatif, peran ini adalah kegiatan yang sangat berpengaruh dengan membuka keterbukaan informasi kepada kalangan masyarakat untuk membantu proses perencanaan pembangunan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002) mengemukakan bahwa istilah peran itu sendiri adalah dinamika kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Kriteria atau karakteristik tersebut mencakup peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

Dari ketiga indikator ini peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan dapat dievaluasi untuk menentukan keberhasilannya. Temuan dalam penelitian tentang Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu antara lain :

## **Peran Aktif**

Indikator Peran aktif menurut Soerjono Soekanto menjelaskan peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya (Soekanto, 2002).

Peran aktif BAPPEDA Provinsi Bengkulu dinilai pada tugas pokok dan fungsi setiap bidang yang ada di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Pencapaian peran aktif di setiap bidang menginginkan hasil yang lebih baik dan tertib serta terkoordinasi antar instansi daerah. Hasil ini pastinya sesuai dengan visi dan misi BAPPEDA Provinsi Bengkulu yaitu "BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT". Apabila perencanaan pembangunan sudah optimal pasti visi dan misi nya mencapai tujuannya.

Berdasarkan penelitian, pengoptimalan kinerja yang dilakukan setiap bidang di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan optimal karena setiap bidang sudah mengerjakan tugas pokoknya dengan baik hal ini di karenakan sudah ada pendukungnya yaitu kualitas sarana prasarana sudah sangat memadai. Keterbukaan informasi mengenai berjalannya proses perencanaan pembangunan daerah sudah tercantum pada website yang sudah dibuat oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Dengan hal itu dapat memudahkan semua kalangan masyarakat ataupun pihak instansi lainnya dapat menyampaikan aspirasinya guna mempengaruhi proses perencanaan pembangunan agar berjalan dan terkoordinasi dengan baik.

Adanya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi juga bisa sangat mengatasi dan mengoptimalkan masalah yang terjadi kedepannya untuk perencanaan pembangunan daerah di Bengkulu. Pegawai di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu paling banyak pada golongan III yang dimana presentasinya 76,86. Posisi kedua di tempati oleh pegawai dengan golongan IV dengan presentase 18,28. Hal ini pegawai di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah memadai untuk membantu peran BAPPEDA di setiap bidangnya.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan hal ini menyatakan bahwa teori peran dari Soerjono Seokanto terkait Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu mengenai peran aktif di setiap bidangnya sudah berjalan dengan baik dan optimal.

## **Peran Partisipatif**

Menurut Soerjono Seokanto (2002) mengatakan bahwa terkait peran partisipatif diperlukan guna untuk mencapai pengoptimalan peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat dalam musyawarah baik itu di tingkat paling rendah yaitu Kelurahan sampai tingkat Kabupaten/Kota kemudian aspirasi masyarakat akan di lanjutkan ke tingkat Provinsi dan Nasional sangat mempengaruhi pada proses perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan berbagai usaha seperti membuka ruang publik dalam acara Forum Publik Rancangan Awal RKPD 2025. Didalam acara tersebut mengundang berbagai kalangan masyarakat, Tokoh Masyarakat, Intansi pemerintahan, Dosen maupun Mahasiswa. Disana keterbukaan informasi sudah di lakukan untuk memudahkan berjalannya acara tersebut. Semua aspirasi masyarakat di tampung dan terealisasikan dengan baik.

Setelah Peneliti melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara terhadap informan hal ini menyatakan bahwa teori peran menurut Soerjono Soekanto Terkait Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan di Bengkulu terkait pada indikator Peran Partisipatif sudah berjalan dengan baik dan optimal.

## **Peran Pasif**

Menurut Soerjono Seokanto mengatakan bahwa peran pasif adalah dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan atau menunggu arahan sehingga berjalan dengan baik. Konsep peran pasif berkaitan dengan seberapa jauh peran BAPPEDA

Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan. Peran ini dapat dikatakan sebagai penyebab tidak optimalnya kinerja yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bengkulu.

Indikator peran pasif dalam peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan mengacu pada peran BAPPEDA lebih bersifat sebagai lembaga yang menunggu arahan atau instruksi dari pihak seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, BAPPEDA cenderung melakukan peran yang lebih reaktif daripada proaktif dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Peran Pasif BAPPEDA juga tertitik pada perbedaan kebijakan pusat terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan. Sehingga peran yang dilakukan oleh BAPPEDA belum optimal.

Dalam konteks ini, hasil yang diharapkan adalah harus optimalnya peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan daerah di Bengkulu. Analisis Peran Pasif yang diterapkan tentunya bertujuan untuk mencapai perbaikan yang positif selaras pada tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan yang ingin dicapai tersebut diharapkan dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu menunjukkan upaya dalam menyelesaikan masalah peran pasif yang cenderung menunggu arahan dan peran pasif BAPPEDA juga tertitik pada perbedaan kebijakan pusat terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan melalui penguatan kapasitas dan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial staff BAPPEDA dan peningkatannya kemandirian dalam perencanaan gunanya untuk mendorong BAPPEDA untuk mengembangkan inisiatif dan program yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal. Serta dengan pemanfaatan Teknologi Informasi gunanya memungkinkan BAPPEDA untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data secara mandiri.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara kepada sejumlah informan. Hal ini menyatakan bahwa teori Seorjono Seokanto terkait Analisis Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bengkulu pada indikator Peran Pasif belum berjalan dengan baik dan optimal.

## **KESIMPULAN**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah instansi atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan di tingkat daerah baik itu di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi. Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perencanaan Pembangunan di Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi indikator peran. Adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

### **1. Indikator Peran Aktif**

Pelaksanaan peran aktif yang dilakukan setiap bidang di Kantor BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan saat ini sudah bekerja dengan optimal. Karena terdapat faktor pendorong yang sudah lengkap untuk membantu pengoptimalan peran dari setiap bidang untuk memenuhi tugas pokok dan tujuannya.

### **2. Indikator Peran Partisipatif**

Peran partisipatif yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan melibatkan peran dari aspirasi berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat sendiri sudah banyak ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga berpengaruh pada BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk mencapai tujuan visi dan misinya. Peran partisipatif yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu sudah berjalan optimal.

### **3. Indikator Peran Pasif**

Pada peran pasif mengacu pada BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pembangunan yang harus menunggu arahan dan peran pasif BAPPEDA juga tertitik pada

perbedaan kebijakan pusat terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan sehingga berjalannya proses perencanaan pembangunan belum berjalan optimal.

Selain itu peran BAPPEDA Provinsi Bengkulu dalam Perencanaan Pembangunan di Bengkulu memiliki faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

#### 1. Faktor pendorong

Adanya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah ini dibuat dan disusun untuk mempermudah kerja setiap OPD dalam menyusun dokumen perencanaan. BAPPEDA Provinsi Bengkulu juga telah terbantu secara maksimal dan bisa terarahkan sesuai tujuannya, adanya SDM Aparatur perencana yang sudah berpendidikan tinggi, Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan, Adanya kepedulian dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Bengkulu, Kinerja yang optimal setiap bidang di Kantor BAPPEDA, dan terakhir Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai.

#### 2. Faktor Penghambat

Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementrian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan kelitbangan ditingkat daerah, belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional, dan adanya perbedaan kepentingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

### DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A.H. and Badan (2020) 'Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(1), pp. 213–224.

Asri, P., Imanda, A. and Lorita, E. (2023) 'Analisis perencanaan kebijakan pembangunan seribu jalan mulus Kabupaten Seluma Tahun 2021', *Jurnal Professional*, 10(1), pp. 135–144.

Creswell, Jhon. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Damaik, S.E. (2019) 'Perencanaan Pembangunan Kehutanan', Google Buku, pp. 1–169.

Gibson, Invancevich dan Donelly. 2002. *Organisasi*. Edisi Kedelapan. Jilid I. Jakarta: Binarupa Aksara.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Handayani, W. *et al.* (2022) *Ketahanan Iklim Berbasis Masyarakat: Konsep dan Implementasi*.

Mahadiansar, M. *et al.* (2020) 'Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1), pp. 77–92.

Maramis, A.P.P., Nayoan, H. and Waworundeng, W. (2021) 'Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Governance*, 1(1), pp. 1–9.

Milles, M.B. dan Huberman, A.M. 1988. *Qualitative data analysis: A Source Book or New*  
*Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis*

*Methods. Beverly Hills: Sage Publications.*

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhidayah (2021) 'Peguruang: Conference Series', 3(November).

Pane, F. (2021) 'Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)'.

Pokok, T. *et al.* (2023) 'KOTA PADANG PANJANG', 1(1), pp. 31–46.

Politik, J.I. and Riyati, V. (2022) 'KEBIJAKAN REFOCUSSING APBD TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN COVID - 19 DI KABUPATEN SEMARANG PROGRAM STUDI ILMU POLITIK'.

Purnamasari, R. and Riksa Praba Haskara, M. (2021) 'Inovasi Teknologi dalam Perubahan Pelayanan Publik Perkotaan', *Jurnal Studi Inovasi*, 1(1), pp. 44–51.

Riyadi, Dodi Slamet. 2002, *Pengembangan Wilayah: Teori Konsep Dasar*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.

Rizam, T. (2019) 'Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur', *Repository Universitas Medan Area*, (2 februari 2019), pp. 1–67.

Rusfiana, Y. and Supriatna, C. (2021) 'Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan', Alfabeta Bandung, p. 148.

Sutarto. 2009. *Dasar-dasar Organisasi*, *Gajah Mada Inersity Press*, Yogyakarta.

Setiadi, S., Nasution, I. and Matondang, A. (2018) 'Analisis Tugas dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah', *Perspektif*, 7(2), pp. 35–39.

Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sholihah, A. and Chrysoekamto, R. (2021) 'Penerapan Manajemen Pengembangan Minat dan Bakat untuk Meningkatkan Potensi Siswa di Madrasah', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), pp. 131–139.

Soliha, W. (2022) 'Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan', *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 13(3), pp. 141–145.

Tumbage, S.M., Tasik C.M, F. and Tumengkol, S.M. (2017) 'Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud', *Acta Diurna*, VI(2), p. 2.

Yuliawati, P., Sopanah, A. and ... (2022) 'Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Blitar'.